



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 170 / II TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

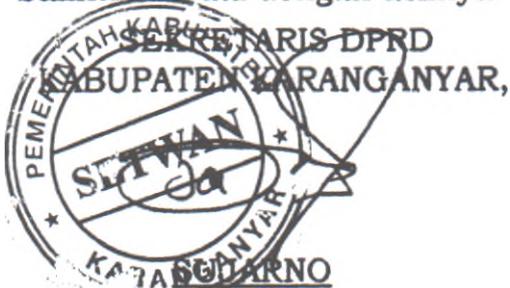
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 October 2016

KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR,



Salinan sesuai dengan aslinya



KATA BUDARNO
NIP. 19630107 199003 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 170/ // TAHUN 2016
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH TAHUN 2017

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

| NO (1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | STATUS (5) | | PELAK SANA- AN (6) | DISERTAI (7) | | UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8) | TARGET PENYAM- PAIAN (9) | KETE- RANGAN (10) |
|-----------|------------------|----------------|---|---------------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | Penje- lasan/ Kete- rangan | | | |
| 1. | Peraturan Daerah | Rumah Susun | 1. Jenis Rumah Susun; 2. Perencanaan; 3. Pembangunan; 4. Sertifikat laik Fungsi; 5. Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan; 6. Pengelolaan; 7. Pengendalian. | Baru | | 2017 | NA | | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. DPU (SKPD Pemrakarsa) 4. BPN 5. Bagian Hukum Setda | April 2017 | UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|----|------------------|--|--|------|------|------|----|------------|--|------------|---|
| 2. | Peraturan Daerah | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan | Perubahan persyaratan dan penghapusan ketentuan daftar ulang | | Ubah | 2017 | | Penjelasan | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. BPMPTSP (SKPD Pemrakarsa) 4. Badan Lingkungan Hidup 5. Bagian Hukum Setda | April 2017 | Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan |
| 3. | Peraturan Daerah | Barang Milik Daerah | 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan; 3. Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan; 4. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah. | Baru | | 2017 | NA | | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. DPPKAD (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. | April 2017 | 1. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Permen-dagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|----|------------------|--|--|------|------|------|----|------------|--|------------|---|
| 4. | Peraturan Daerah | Perubahan atas Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu | penghapusan ketentuan daftar ulang | | Ubah | 2017 | | Penjelasan | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. BPMPTSP (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. | April 2017 | Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan |
| 5. | Peraturan Daerah | Hibah dan Bansos | 1. Penganggaran; 2. pelaksanaan dan penatausahaan; 3. pelaporan dan pertanggungjawaban; 4. monitoring dan evaluasi. | Baru | | 2017 | NA | | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. DPPKAD (SKPD Pemrakarsa) Bagian Hukum Setda. | April 2017 | 1. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|----|------------------|--|--|------|------|------|----|------------|--|------------|--|
| | | | | | | | | | yang bersumber dari APBD | | |
| 6. | Peraturan Daerah | Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha | Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | Ubah | 2017 | | Penjelasan | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. DPPKAD 4. Bagian Umum Setda.(SKPD Pemrakarsa) 5. SKPD....(terkait) | April 2017 | UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 7. | Peraturan Daerah | Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah. | Perubahan badan usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. | Baru | | 2017 | NA | | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Perekonomian Setda.(SKPD /Unit Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. | April 2017 | UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|------------------|---|---|------|------|----|---|------------|-----------------------------------|
| 8. 3 | Peraturan Daerah | Perusahaan Daerah BPR Bank Karanganyar | Perubahan badan usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. | Baru | 2017 | NA | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Perekonomian Setda.(SKPD / Unit Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. | April 2017 | UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda |
| 9. a | Peraturan Daerah | Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar | 1. Perubahan badan usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. 2. Perubahan modal dasar | Baru | 2017 | NA | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Perekonomian Setda.(SKPD /Unit Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. | April 2017 | UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|-----|------------------|---|--|------|---|------|----|------------|--|--------------|--|
| 10. | Peraturan Daerah | Air Limbah | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik | Baru | | 2017 | NA | | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Badan Lingkungan Hidup (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. | April 2017 | UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan |
| 11. | Peraturan Daerah | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kesetaraan Difabel | Penyesuaian dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas : 1. Penyesuaian definisi, Asas dan Tujuan Pelaksanaan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Hak Difabel; 2. Penambahan pengaturan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. | Ubah | | 2017 | | Penjelasan | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Dinsosnaker trans.(SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Kesra Setda. 5. Bagian Hukum Setda. | Agustus 2017 | UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|------------------------------|---|------|------|----|--|--------------|--|
| 12. | Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Perpustakaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Perpustakaan; 2. Koleksi dan layanan; 3. Kewajiban Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan; 4. Jenis-jenis perpustakaan; tenaga pengelola perpustakaan dan pendidikan; 5. Sarana dan prasarana, serta pendanaan 6. Sumber Daya Manusia. 7. Pembudayaan kegemaran membaca. | Baru | 2017 | NA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Kantor Perpustakaan dan Arsip. (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 6. Bappeda. 7. Bagian Kesra. | Agustus 2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|------------------------------------|---|------|------|----|--|--------------|--|
| 13. | Peraturan Daerah | Pengelolaan Kearsipan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Kearsipan Daerah 2. Pengelolaan Arsip Dinamis dinamis In Aktif; 3. Pengelolaan Arsip Statis; 4. Penataan Berkas, Retensi Arsip; Pemusnahan Arsip; 5. Sarana dan Prasarana Kearsipan. 6. Kerjasama dan Peran serta masyarakat | Baru | 2017 | NA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Kantor Perpustakaan dan Arsip (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 6. Bappeda. 7. DPPKAD | Agustus 2017 | UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan |
| 14. | Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak | Hak Anak yang wajib dipenuhi | Baru | 2017 | NA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. BP3AKB (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Hukum Setda. | Agustus 2017 | UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|------------------|---|---|------|------|----|---|--------------|--|
| 15. 8 | Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia | 1. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab; 2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; 3. Kelembagaan dan Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; 4. Sanksi Administrasi; Pembiayaan. | Baru | 2017 | NA | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Dinsosnakertrans (SKPD Pemrakarsa) 4. Bagian Kesra Setda. 5. Bagian Hukum Setda. | Agustus 2017 | 1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial |
| 16. 9 | Peraturan Daerah | Penyelenggaraan HAM | 1. Pelaksanaan HAM; 2. Kabupaten Layak Ham; 3. Tugas, Peran dan Kewajiban; 4. Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat; dan Pembiayaan. | Baru | 2017 | NA | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Hukum Setda (SKPD/Unit Pemrakarsa) | Agustus 2017 | UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|------------------|--|---|------|------|----|---|--------------|---|
| 17 10 | Peraturan Daerah | Bantuan Hukum Kepada masyarakat Miskin | 1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 2. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum; 3. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan; 4. Larangan; dan Sanksi Administratif. | Baru | 2017 | NA | 1. Inspektorat 2. Satpol PP 3. Bagian Hukum Setda (SKPD/ Unit Pemrakarsa) | Agustus 2017 | 1. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 2. PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
|-----|------------------|-------------------------------------|--|------|---|------|----|---|------|--------------|--|
| 18. | Peraturan Daerah | Pengembangan Produk UMKM | Pengembangan usaha berbasis potensi daerah yang mempunyai daya saing | Baru | | 2017 | NA | | DPRD | Oktober 2017 | UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM |
| 19. | Peraturan Daerah | Penanggulan- angan Kemiskinan | 1. Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak warga miskin. 2. Upaya Penanggulangan kemiskinan. | Baru | | 2017 | NA | | DPRD | Oktober 2017 | 1. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |

DAFTAR RANCANGAN PERDA KUMULATIF TERBUKA

| NO | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|------------------|-------------------------------|---|--------|------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan/Keterangan | | | |
| 20. | Peraturan Daerah | Akibat Putusan Mahkamah Agung | | | | | | | | | |
| 21. | Peraturan Daerah | APBD | a. APBD 2018 b. Pertanggungjawaban APBD 2016 c. Perubahan APBD 2017 | | | | | | | | |

KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR,



Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 19630107 199003 1 004